



PENERTIBAN APK MARATON HINGGA 11 JANUARI 2024

Jadi Sitaan Bawaslu, Tak Bisa Diambil Peserta Pemilu

YOGYA (KR) - Alat peraga kampanye (APK) yang sudah direkomendasikan melanggar oleh Bawaslu Kota Yogya mulai ditertibkan. APK tersebut menjadi sitaan Bawaslu dan tidak bisa lagi diambil oleh peserta pemilu.

Komisiner Bawaslu Kota Yogya Divisi Penanganan Pelanggaran Jantan Putra Bangsa, menjelaskan sejak awal jajarannya sudah memberikan pemahaman partai politik peserta Pemilu 2024 jika APK melanggar yang terpaksa harus ditertibkan oleh petugas akan menjadi sitaannya. "Jadi tidak bisa kita berikan lagi. Artinya tidak bisa diambil oleh peserta pemilu. Itu menjadi sitaan, dan kita simpan di gudang," tandasnya di sela aksi penertiban APK melanggar, Jumat (5/1).

Sebelumnya total ada 3.282 APK yang sudah di-

rekomendasikan melanggar. Sementara APK yang telah ditertibkan secara mandiri oleh peserta pemilu mencapai 158 APK. Bawaslu berharap peserta pemilu mampu menertibkan APK nya yang melanggar secara mandiri supaya tidak menjadi sitaan petugas. Sebelum melakukan aksi penertiban, pendekatan persuasif juga sudah dilakukan. Akan tetapi ketika itu tidak di-

tegas sesuai amanah regulasi bakal ditegakkan. Jantan menjelaskan penertiban APK melanggar menjadi keharusan guna

menjaga pemilu yang bermartabat. Hal ini karena ada aturan yang telah menjadi pedoman semua pihak. Khusus APK diatur dalam Perwal 75/2023, baik berupa jenis, proses perizinan hingga teknis pemasangan. "Pemilu ini harus bermartabat, harus jauh dari kecurangan, harus minim dari yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Makanya kalau kemudian ini adalah bentuk pelanggaran ya harus kita tertibkan," tandasnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol

PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, menjelaskan pihaknya menjadi fasilitator dalam aksi penertiban APK melanggar. Tentunya hal itu didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu yang telah disampaikan ke KPU. Total ada lebih dari 100 personel Sat Pol PP Kota Yogya yang diterjunkan, baik dari mako induk maupun BKO dari kemantren.

Memurutnya, untuk menertibkan ribuan APK melanggar tersebut dibutuhkan waktu cukup panjang. Pihaknya sudah menjadwalkan kegiatan secara maraton sejak kemarin hingga 11 Januari 2024 mendatang. "Seluruh APK yang sudah kami tertibkan ini akan kami kirimkan ke gudang Bawaslu



Aksi penertiban APK melanggar di kawasan Jalan Kusumanegara.

Kota Yogya yang ada di Kotagede," tandasnya.

Jenis APK melanggar yang ditertibkannya mayoritas berupa rontek dan baliho. Sedangkan bentuk

pelanggaran cukup bervariasi mulai dari pemasangan di pohon, tiang listrik, jembatan, kawasan larangan hingga aset milik pemerintah.

Selama aksi penertiban kemarin juga tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun sehingga mampu berjalan sesuai harapan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005